



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dinamika sosial, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, merata, inklusif dan berkeadilan, serta tuntutan peningkatan mutu tata kelola satuan pendidikan menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR DAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pendidikan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat UPTD SPF SD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPTD SPF SMP adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan.
13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD SPF SD atau Kepala UPTD SPF SMP.

14. Jabatan Nonmanajerial adalah jabatan Aparatur Sipil Negara yang tidak memiliki fungsi kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, yang tugas dan fungsinya berfokus pada pelaksanaan pelayanan pendidikan, kegiatan teknis, operasional, dan/atau keahlian tertentu.
15. Pemangku Jabatan Nonmanajerial adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas, terdiri atas:
 - a. UPTD SPF SD; dan
 - b. UPTD SPF SMP.
- (2) UPTD SPF SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) UPTD SPF SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III UPTD SPF SD

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD SPF SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas.
- (2) UPTD SPF SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh Pejabat Fungsional guru yang diberi tugas tambahan mengelola pendidikan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. pustakawan.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD SPF SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD SPF SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. administrasi.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengelola pendidikan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan dan strategi pelaksanaan program pendidikan dasar;
 - c. melakukan pembinaan guru, tenaga kependidikan dan pelaksana di lingkungan SD;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum administrasi sekolah dan proses pembelajaran di lingkungan SD;
 - e. memantau kehadiran, kinerja guru dan mutu pendidikan di lingkungan sekolah SD; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar dan melaporkan kepada Dinas.

BAB IV
UPTD SPF SMP

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) UPTD SPF SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas.
- (2) UPTD SPF SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh Pejabat Fungsional guru yang diberi tugas tambahan mengelola pendidikan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. wakil kepala UPTD;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksimal 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi satuan pendidikan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. guru; dan
 - b. pustakawan.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD SPF SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. pendidikan;
 - b. hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. administrasi.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengelola pendidikan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan dan strategi pelaksanaan program pendidikan dasar;
 - c. melakukan pembinaan guru, tenaga kependidikan dan pelaksana di lingkungan SMP;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum administrasi sekolah dan proses pembelajaran di lingkungan SMP;
 - e. memantau kehadiran, kinerja guru dan mutu Pendidikan di lingkungan sekolah SMP; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar dan melaporkan kepada Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN NONMANAJERIAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Nonmanajerial terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.
- (2) Pengangkatan Pemangku Jabatan Nonmanajerial pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan administrasi sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, kelompok Jabatan Fungsional, dan kelompok Jabatan Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat Nonmanajerial pada UPTD SPF SD dan UPTD SPF SMP pada Dinas, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 59) dan Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 58) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 59); dan

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 58).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA
DINAS PENDIDIKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR :

1. UPTD SPF SD Inpres Baddoka;
2. UPTD SPF SD Inpres Bakung 1;
3. UPTD SPF SD Inpres Bakung 2;
4. UPTD SPF SD Inpres Daya;
5. UPTD SPF SD Inpres Kalang Tubung 2;
6. UPTD SPF SD Inpres Kalangtubung 1;
7. UPTD SPF SD Inpres Lae-Lae 2;
8. UPTD SPF SD Inpres Laikang;
9. UPTD SPF SD Inpres Mandai;
10. UPTD SPF SD Inpres Mangga Tiga;
11. UPTD SPF SD Inpres Mannuruki 1;
12. UPTD SPF SD Inpres Mannuruki 2;
13. UPTD SPF SD Inpres Paccerakkang;
14. UPTD SPF SD Inpres Pagandongan 1;
15. UPTD SPF SD Inpres Pagandongan 2;
16. UPTD SPF SD Inpres Pai 1;
17. UPTD SPF SD Inpres Pai 2;
18. UPTD SPF SD Inpres Pajjaiang;
19. UPTD SPF SD Inpres Pajjaiang 2;
20. UPTD SPF SD Inpres Sudiang;
21. UPTD SPF SD Inpres Tangkala 1;
22. UPTD SPF SD Inpres Tangkala II;
23. UPTD SPF SD Negeri Baddoka;
24. UPTD SPF SD Negeri Batutambung;
25. UPTD SPF SD Negeri Bulurokeng;
26. UPTD SPF SD Negeri Bulurokeng 1;
27. UPTD SPF SD Negeri Daya 1;
28. UPTD SPF SD Negeri Daya II;
29. UPTD SPF SD Negeri Malewang;
30. UPTD SPF SD Negeri Mandai;
31. UPTD SPF SD Negeri Nusa Harapan Permai;
32. UPTD SPF SD Negeri Paccerakkang;
33. UPTD SPF SD Negeri Pai;
34. UPTD SPF SD Negeri Pajjaiang;

35. UPTD SPF SD Negeri Sipala I Makassar;
36. UPTD SPF SD Negeri Sipala II Makassar;
37. UPTD SPF SD Negeri Sudiang;
38. UPTD SPF SD Inpres Layang Bertingkat;
39. UPTD SPF SD Inpres Layang Tua I;
40. UPTD SPF SD Inpres Layang Tua II;
41. UPTD SPF SD Negeri Baraya I;
42. UPTD SPF SD Negeri Baraya II;
43. UPTD SPF SD Negeri Gaddong 2;
44. UPTD SPF SD Negeri Layang IV 72;
45. UPTD SPF SD Negeri Pongtiku 1;
46. UPTD SPF SD Negeri Pongtiku 2;
47. UPTD SPF SD Inpres Bawakaraeng;
48. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Bara Baraya II;
49. UPTD SPF SD Inpres Maccini;
50. UPTD SPF SD Inpres Maccini 11;
51. UPTD SPF SD Inpres Mongisidi;
52. UPTD SPF SD Negeri Bara Baraya I;
53. UPTD SPF SD Negeri Bawakaraeng I;
54. UPTD SPF SD Negeri Bawakaraeng II;
55. UPTD SPF SD Negeri Bawakaraeng III;
56. UPTD SPF SD Negeri Kip Bara Baraya II;
57. UPTD SPF SD Negeri Kip Bara-Baraya I;
58. UPTD SPF SD Negeri Kip Maccini;
59. UPTD SPF SD Negeri Kip V Bara Baraya;
60. UPTD SPF SD Negeri Lariang Bangi I;
61. UPTD SPF SD Negeri Maccini 2;
62. UPTD SPF SD Negeri Maradekaya 1;
63. UPTD SPF SD Negeri Maradekaya 2;
64. UPTD SPF SD Negeri Maricaya 2;
65. UPTD SPF SD Negeri Mongisidi 2;
66. UPTD SPF SD Negeri Mongisidi 3;
67. UPTD SPF SD Negeri Unggulan Mongisidi 1;
68. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Labuang Baji;
69. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Mamajang 1;
70. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Mamajang 2;
71. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Mamajang 3;
72. UPTD SPF SD Inpres Parang;
73. UPTD SPF SD Inpres Sambung Jawa 1;
74. UPTD SPF SD Inpres Sambung Jawa 2;
75. UPTD SPF SD Inpres Sambung Jawa 3;
76. UPTD SPF SD Negeri Cendrawasih;
77. UPTD SPF SD Negeri Cendrawasih I;
78. UPTD SPF SD Negeri Kapota Yudha;
79. UPTD SPF SD Negeri Kapota Yudha I;
80. UPTD SPF SD Negeri Komp Sambung Jawa;
81. UPTD SPF SD Negeri Labuang Baji I;
82. UPTD SPF SD Negeri Labuang Baji II;

83. UPTD SPF SD Negeri Mamajang I;
84. UPTD SPF SD Negeri Mamajang II;
85. UPTD SPF SD Negeri Mawas;
86. UPTD SPF SD Negeri Tanggul Patompo 1;
87. UPTD SPF SD Negeri Tanggul Patompo 2;
88. UPTD SPF SD Inpres Antang I;
89. UPTD SPF SD Inpres Antang II;
90. UPTD SPF SD Inpres Bangkala I;
91. UPTD SPF SD Inpres Bangkala II;
92. UPTD SPF SD Inpres Bangkala III;
93. UPTD SPF SD Inpres Batua I;
94. UPTD SPF SD Inpres Batua II;
95. UPTD SPF SD Inpres Bitoa;
96. UPTD SPF SD Inpres Borong;
97. UPTD SPF SD Inpres Borong Jambu I;
98. UPTD SPF SD Inpres Borong Jambu II;
99. UPTD SPF SD Inpres Borong Jambu III;
100. UPTD SPF SD Inpres Kajenjeng;
101. UPTD SPF SD Inpres Kassi;
102. UPTD SPF SD Inpres Manggala;
103. UPTD SPF SD Inpres Nipa-Nipa;
104. UPTD SPF SD Inpres Pannara;
105. UPTD SPF SD Inpres Perumnas Antang I;
106. UPTD SPF SD Inpres Perumnas Antang II;
107. UPTD SPF SD Inpres Perumnas Antang III;
108. UPTD SPF SD Inpres Perumnas Antang I1;
109. UPTD SPF SD Inpres Perumnas Antang I2;
110. UPTD SPF SD Inpres Tamangapa;
111. UPTD SPF SD Inpres Tello Baru I;
112. UPTD SPF SD Inpres Tello Baru II;
113. UPTD SPF SD Inpres Unggulan Puri Taman Sari;
114. UPTD SPF SD Negeri Borong;
115. UPTD SPF SD Negeri Kassi;
116. UPTD SPF SD Negeri Pannara;
117. UPTD SPF SD Negeri Parinring;
118. UPTD SPF SD Inpres Mariso 1;
119. UPTD SPF SD Inpres Mariso 2;
120. UPTD SPF SD Inpres Mariso 3;
121. UPTD SPF SD Inpres Mariso I;
122. UPTD SPF SD Negeri Bontorannu 1;
123. UPTD SPF SD Negeri Garuda;
124. UPTD SPF SD Negeri Kakatua;
125. UPTD SPF SD Negeri Mattoangin 1;
126. UPTD SPF SD Negeri Mattoangin 2;
127. UPTD SPF SD Negeri Patompo II;
128. UPTD SPF SD Negeri Rajawali;
129. UPTD SPF SD Inpres Karuwisi 1;
130. UPTD SPF SD Inpres Karuwisi 2;
131. UPTD SPF SD Inpres Pampang 1;

131. UPTD SPF SD Inpres Pampang II;
132. UPTD SPF SD Inpres Panaikang 1 I;
133. UPTD SPF SD Inpres Panaikang II I;
134. UPTD SPF SD Inpres Paropo;
135. UPTD SPF SD Inpres Tamajene;
136. UPTD SPF SD Inpres Tamamaung I;
137. UPTD SPF SD Inpres Tamamaung II;
138. UPTD SPF SD Inpres Tamamaung III;
139. UPTD SPF SD Inpres Tamamaung IV;
140. UPTD SPF SD Inpres Tello Baru;
141. UPTD SPF SD Inpres Tello Baru I I;
142. UPTD SPF SD Inpres Tello Baru I 2;
143. UPTD SPF SD Inpres Toddopuli 1;
144. UPTD SPF SD Inpres Unggulan Toddopuli;
145. UPTD SPF SD Negeri Batulaccu;
146. UPTD SPF SD Negeri Karuwisi 2;
147. UPTD SPF SD Negeri Paccinang;
148. UPTD SPF SD Negeri Paccinang 1;
149. UPTD SPF SD Negeri Pampang;
150. UPTD SPF SD Negeri Panaikang 1;
151. UPTD SPF SD Negeri Panaikang 2;
152. UPTD SPF SD Negeri Panaikang 3;
153. UPTD SPF SD Negeri Pannyikkokang 1;
154. UPTD SPF SD Negeri Pannyikkokang II;
155. UPTD SPF SD Negeri Tamamaung;
156. UPTD SPF SD Negeri Tamamaung 1;
157. UPTD SPF SD Inpres Perumnas;
158. UPTD SPF SD Inpres Banta Bantaeng I;
159. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Kelapa Tiga;
160. UPTD SPF SD Inpres Btn Ikip I;
161. UPTD SPF SD Inpres Btn Ikip II;
162. UPTD SPF SD Inpres Cilallang;
163. UPTD SPF SD Inpres Gunung Sari Baru;
164. UPTD SPF SD Inpres Kampus Ikip;
165. UPTD SPF SD Inpres Karunrung;
166. UPTD SPF SD Inpres Kassi Kassi;
167. UPTD SPF SD Inpres Kassi Kassi 1;
168. UPTD SPF SD Inpres Kelapa Tiga I;
169. UPTD SPF SD Inpres Mangasa I;
170. UPTD SPF SD Inpres Minasa Upa;
171. UPTD SPF SD Inpres Minasa Upa 1;
172. UPTD SPF SD Inpres Perumnas I;
173. UPTD SPF SD Inpres Perumnas II;
174. UPTD SPF SD Inpres Perumnas IV;
175. UPTD SPF SD Inpres Tidung II;
176. UPTD SPF SD Inpres Unggulan Btn Pemda;
177. UPTD SPF SD Negeri Aroeppala;
178. UPTD SPF SD Negeri Gunung Sari I;

179. UPTD SPF SD Negeri Gunung Sari II;
180. UPTD SPF SD Negeri Kompleks Ikip;
181. UPTD SPF SD Negeri Kompleks Ikip I;
182. UPTD SPF SD Negeri Mangasa;
183. UPTD SPF SD Negeri Minasa Upa;
184. UPTD SPF SD Negeri Rappocini;
185. UPTD SPF SD Negeri Tidung;
186. UPTD SPF SD Inpres Baraya 1;
187. UPTD SPF SD Inpres Baraya 2;
188. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Kaluku Bodoa;
189. UPTD SPF SD Inpres Buttatianang II;
190. UPTD SPF SD Inpres Cambaya 1;
191. UPTD SPF SD Inpres Cambaya 2 Tallo;
192. UPTD SPF SD Inpres Cambaya III;
193. UPTD SPF SD Inpres Cambaya IV;
194. UPTD SPF SD Inpres Galangan Kapal I;
195. UPTD SPF SD Inpres Galangan Kapal II;
196. UPTD SPF SD Inpres Galangan Kapal III;
197. UPTD SPF SD Inpres Galangan Kapal IV;
198. UPTD SPF SD Inpres Layang III;
199. UPTD SPF SD Inpres Malimongan Baru;
200. UPTD SPF SD Inpres Pannampu 1;
201. UPTD SPF SD Inpres Pannampu 2;
202. UPTD SPF SD Inpres Pannampu 3;
203. UPTD SPF SD Inpres Rappo Jawa;
204. UPTD SPF SD Inpres Rappokalling 1;
205. UPTD SPF SD Inpres Rappokalling 2;
206. UPTD SPF SD Inpres Tallo Tua 1;
207. UPTD SPF SD Inpres Tallo Tua 2;
208. UPTD SPF SD Inpres Ujung Pandang Baru 1;
209. UPTD SPF SD Negeri 67 Rappokalling;
210. UPTD SPF SD Negeri Beroanging;
211. UPTD SPF SD Negeri Kaluku Bodoa;
212. UPTD SPF SD Negeri Kalukuang 1;
213. UPTD SPF SD Negeri Kalukuang II;
214. UPTD SPF SD Negeri Kalukuang III;
215. UPTD SPF SD Negeri Kalukuang IV;
216. UPTD SPF SD Negeri Lakkang;
217. UPTD SPF SD Negeri Rappojawa No. 71;
218. UPTD SPF SD Negeri Rappokalling 671;
219. UPTD SPF SD Negeri Tallo Tua 69;
220. UPTD SPF SD Inpres Bira 1;
221. UPTD SPF SD Inpres Bira 2;
222. UPTD SPF SD Inpres Bontojai;
223. UPTD SPF SD Inpres Bung;
224. UPTD SPF SD Inpres Kampus Unhas;
225. UPTD SPF SD Inpres Kampus Unhas 1;
226. UPTD SPF SD Inpres Kantisang;

227. UPTD SPF SD Inpres Kapasa;
228. UPTD SPF SD Inpres Kera-Kera;
229. UPTD SPF SD Inpres Lanraki 1;
230. UPTD SPF SD Inpres Lanraki 2;
231. UPTD SPF SD Inpres Lantebung;
232. UPTD SPF SD Inpres Tamalanrea 1;
233. UPTD SPF SD Inpres Tamalanrea 2;
234. UPTD SPF SD Inpres Tamalanrea 3;
235. UPTD SPF SD Inpres Tamalanrea 4;
236. UPTD SPF SD Inpres Tamalanrea 5;
237. UPTD SPF SD Inpres Tamalanrea 6;
238. UPTD SPF SD Negeri Bontoa;
239. UPTD SPF SD Negeri Bontojai;
240. UPTD SPF SD Negeri Bontoramba;
241. UPTD SPF SD Negeri Bontoramba 1;
242. UPTD SPF SD Negeri Kapasa;
243. UPTD SPF SD Negeri Pagandongan;
244. UPTD SPF SD Negeri Tamalanrea;
245. UPTD SPF SD Inpres Mallengkeri Bertingkat;
246. UPTD SPF SD Inpres Andi Tonro;
247. UPTD SPF SD Inpres Balang Boddong;
248. UPTD SPF SD Inpres Barombong 2;
249. UPTD SPF SD Inpres Barombong 3;
250. UPTD SPF SD Inpres Bontoa;
251. UPTD SPF SD Inpres Bontomanai;
252. UPTD SPF SD Inpres Gontang;
253. UPTD SPF SD Inpres Hartaco Indah;
254. UPTD SPF SD Inpres Jongaya;
255. UPTD SPF SD Inpres Jongaya 1;
256. UPTD SPF SD Inpres Maccini Baru;
257. UPTD SPF SD Inpres Maccini Sombala;
258. UPTD SPF SD Inpres Maccini Sombala 1;
259. UPTD SPF SD Inpres Malengkeri 1;
260. UPTD SPF SD Inpres Malengkeri Bertingkat I;
261. UPTD SPF SD Inpres Mallengkeri 2;
262. UPTD SPF SD Inpres Pa Baeng-Baeng;
263. UPTD SPF SD Inpres Pabaeng-Baeng 1;
264. UPTD SPF SD Negeri Balang Baru;
265. UPTD SPF SD Negeri Balang Baru 1;
266. UPTD SPF SD Negeri Balang Boddong;
267. UPTD SPF SD Negeri Barombong;
268. UPTD SPF SD Negeri Bayang;
269. UPTD SPF SD Negeri Kaccia;
270. UPTD SPF SD Negeri Kumala;
271. UPTD SPF SD Negeri Maccini Sombala;
272. UPTD SPF SD Negeri Mannuruki;
273. UPTD SPF SD Negeri Parang Tambung 1;
274. UPTD SPF SD Negeri Parangtambung II;

275. UPTD SPF SD Negeri Sumanna;
276. UPTD SPF SD Negeri Timbuseng II;
277. UPTD SPF SD Inpres Lae-Lae 1;
278. UPTD SPF SD Negeri Bulogading;
279. UPTD SPF SD Negeri Gotong-Gotong I;
280. UPTD SPF SD Negeri Lanto Dg Pasewang;
281. UPTD SPF SD Negeri Mangkura I;
282. UPTD SPF SD Negeri Mangkura II;
283. UPTD SPF SD Negeri Mangkura III;
284. UPTD SPF SD Negeri Mangkura IV;
285. UPTD SPF SD Negeri Mangkura V;
286. UPTD SPF SD Negeri Sudirman I;
287. UPTD SPF SD Negeri Sudirman II;
288. UPTD SPF SD Negeri Sudirman III;
289. UPTD SPF SD Negeri Sudirman IV;
290. UPTD SPF SD Percontohan Pam;
291. UPTD SPF SD Inpres Barrang Caddi 2;
292. UPTD SPF SD Inpres Barrang Lompo;
293. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Tabaringan I;
294. UPTD SPF SD Inpres Cambaya 1;
295. UPTD SPF SD Inpres Cambaya 2;
296. UPTD SPF SD Inpres Tabaringan;
297. UPTD SPF SD Inpres Tabaringan I;
298. UPTD SPF SD Negeri Barrang Caddi;
299. UPTD SPF SD Negeri Barrang Lompo;
300. UPTD SPF SD Negeri Cambaya;
301. UPTD SPF SD Negeri Kodingareng;
302. UPTD SPF SD Negeri Langkai;
303. UPTD SPF SD Negeri Lumu-Lumu;
304. UPTD SPF SD Negeri Pattingalloang 1;
305. UPTD SPF SD Negeri Tabaringan 5;
306. UPTD SPF SD Negeri Ujung Tanah 2;
307. UPTD SPF SD Negeri Ujung Tanah I;
308. UPTD SPF SD Inpres Bertingkat Butung;
309. UPTD SPF SD Negeri Butung 1;
310. UPTD SPF SD Negeri Butung 2;
311. UPTD SPF SD Negeri Melayu;
312. UPTD SPF SD Negeri Melayu Muhammadiyah;
313. UPTD SPF SD Negeri Sangir; dan
314. UPTD SPF SD Negeri Timor.



WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA
DINAS PENDIDIKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA :

1. UPTD SPF SMP Negeri 1 Makassar;
2. UPTD SPF SMP Negeri 2 Makassar;
3. UPTD SPF SMP Negeri 3 Makassar;
4. UPTD SPF SMP Negeri 4 Makassar;
5. UPTD SPF SMP Negeri 5 Makassar;
6. UPTD SPF SMP Negeri 6 Makassar;
7. UPTD SPF SMP Negeri 7 Makassar;
8. UPTD SPF SMP Negeri 8 Makassar;
9. UPTD SPF SMP Negeri 9 Makassar;
10. UPTD SPF SMP Negeri 10 Makassar;
11. UPTD SPF SMP Negeri 11 Makassar;
12. UPTD SPF SMP Negeri 12 Makassar;
13. UPTD SPF SMP Negeri 13 Makassar;
14. UPTD SPF SMP Negeri 14 Makassar;
15. UPTD SPF SMP Negeri 15 Makassar;
16. UPTD SPF SMP Negeri 16 Makassar;
17. UPTD SPF SMP Negeri 17 Makassar;
18. UPTD SPF SMP Negeri 18 Makassar;
19. UPTD SPF SMP Negeri 19 Makassar;
20. UPTD SPF SMP Negeri 20 Makassar;
21. UPTD SPF SMP Negeri 21 Makassar;
22. UPTD SPF SMP Negeri 22 Makassar;
23. UPTD SPF SMP Negeri 23 Makassar;
24. UPTD SPF SMP Negeri 24 Makassar;
25. UPTD SPF SMP Negeri 25 Makassar;
26. UPTD SPF SMP Negeri 26 Makassar;
27. UPTD SPF SMP Negeri 27 Makassar;
28. UPTD SPF SMP Negeri 28 Makassar;
29. UPTD SPF SMP Negeri 29 Makassar;
30. UPTD SPF SMP Negeri 30 Makassar;
31. UPTD SPF SMP Negeri 31 Makassar;
32. UPTD SPF SMP Negeri 32 Makassar;
33. UPTD SPF SMP Negeri 33 Makassar;

34. UPTD SPF SMP Negeri 34 Makassar;
35. UPTD SPF SMP Negeri 35 Makassar;
36. UPTD SPF SMP Negeri 36 Makassar;
37. UPTD SPF SMP Negeri 37 Makassar;
38. UPTD SPF SMP Negeri 38 Makassar;
39. UPTD SPF SMP Negeri 39 Makassar;
40. UPTD SPF SMP Negeri 40 Makassar;
41. UPTD SPF SMP Negeri 41 Satu Atap Makassar;
42. UPTD SPF SMP Negeri 42 Makassar;
43. UPTD SPF SMP Negeri 43 Makassar;
44. UPTD SPF SMP Negeri 44 Satu Atap Makassar;
45. UPTD SPF SMP Negeri 45 Makassar;
46. UPTD SPF SMP Negeri 46 Makassar;
47. UPTD SPF SMP Negeri 47 Makassar;
48. UPTD SPF SMP Negeri 48 Makassar;
49. UPTD SPF SMP Negeri 49 Makassar;
50. UPTD SPF SMP Negeri 50 Makassar;
51. UPTD SPF SMP Negeri 51 Makassar;
52. UPTD SPF SMP Negeri 52 Makassar;
53. UPTD SPF SMP Negeri 53 Makassar;
54. UPTD SPF SMP Negeri 54 Makassar; dan
55. UPTD SPF SMP Negeri 55 Makassar;



WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA
DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR



WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

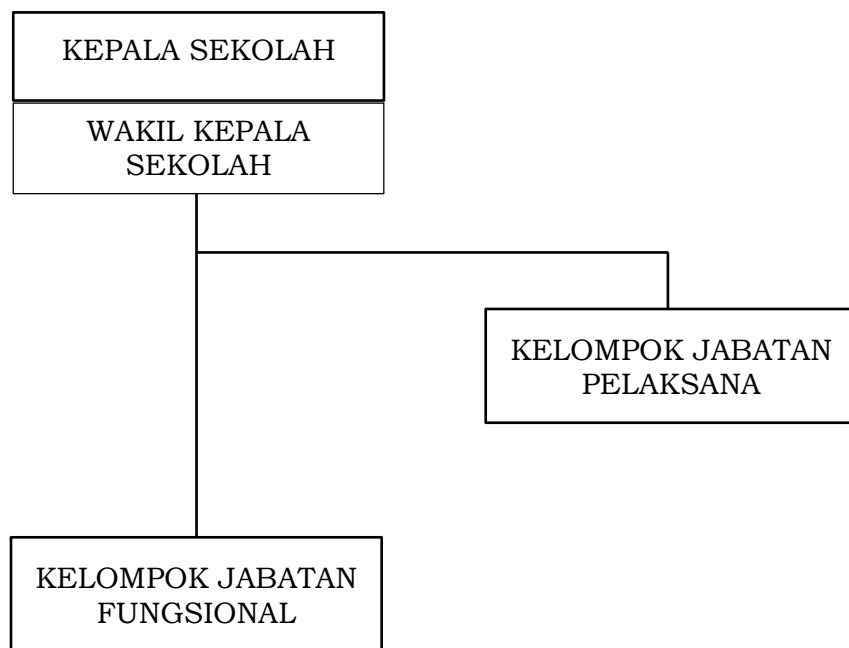
Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR DAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA
DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.